

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemilu dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan sistem non-proporsional. Yang terakhir sering disebut sebagai sistem distrik. Tetapi jika mencermati pemilu yang dipakai oleh negara-negara yang pernah menyelenggarakan pemilu, jumlah sistem pemilu sebenarnya cukup banyak. Karena itulah, sistem pemilu dibagi kedalam rumpun keluarga masing-masing secara umum, terdapat empat rumpun keluarga dalam sistem pemilu, yaitu sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majoritas*), sistem perwakilan proporsional (*proporsional representation system*), sistem campuran (*mixed system*), dan sistem-sistem yang lain (*other system*), dan masing-masing rumpun ini memiliki varian-varian.¹

Masing-masing di dalam sistem pemilu memiliki konsekuensi-konsekuensi khususnya yang berkaitan dengan keterwakilan dan relasi antara wakil dan terwakil. Misalnya Sistem proporsional yang menghasilkan tingkat keterwakilan yang cukup tinggi, partai-partai yang bersaing di dalam pemilu, termasuk partai-partai kecil dimungkinkan memiliki wakil dilembaga perwakilan (DPR/D). Meskipun demikian, relasi antar wakil dan terwakil menjadi kurang kuat. Sementara itu, didalam sistem distrik, derajat keterwakilannya lebih rendah karena sistem ini menggunakan prinsip *the winners takes all* untuk *single member*

¹ Prihatmoko, Joko J. (2008). *Mendemokratiskan Pemilu, dari sistem sampai elemen teknis*. Semarang. Pustaka Pelajar. Hal.vii.

district. Konsekuensinya, hanya partai atau kelompok besar saja yang dimungkinkan menempatkan wakilnya dilembaga perwakilan. Hanya saja, didalam sistem ini dimungkinkan relasi antara wakil dan terwakil lebih erat.

Di Indonesia, perbincangan ini menguat sejak jatuhnya Orde Baru. Indonesia menganut sistem proporsional dengan modifikasi-modifikasinya. Hal ini terlihat dari pemilu 1999 sampai pemilu 2009. Secara perlahan Indonesia mencoba untuk menggabungkan dimensi-dimensi di dalam sistem proporsional dan dimensi-dimensi didalam sistem distrik. Realitas semacam itu, tidak lepas dari keinginan untuk mencapai dua hal sekaligus, yaitu adanya sistem perwakilan yang menganut prinsip proporsionalitas dan keinginan bagi terbangunnya relasi yang lebih baik antara wakil dan terwakil.

Sistem yang digunakan pada seluruh pemilu pada masa Orde Baru sampai Pemilu 1999 adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup (*PR Closed List*). Baru pada Pemilu 2004 yang berdasarkan UU No 12/ 2003 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Akan tetapi, karena penetapan calon terpilih masih dibatasi dengan perolehan suara sebesar BPP, kita akhirnya mengetahui bahwa sistem proporsional yang namanya terbuka telah berjalan sebagai sistem yang tertutup (sedikit terbuka).

Partai Golkar merupakan jelmaan dari Golongan Karya (Golkar) yang di era pemerintahan presiden Soeharto selalu unggul dalam perolehan suara, dari mulai pemilu 1971 hingga 1997. keunggulan politik inilah yang membuat Golkar pada waktu itu selalu menguasai eksekutif dan legislatif di Indonesia selama hampir 30-an tahun. Sedangkan Golkar sendiri merupakan kelanjutan dari Sekretariat

Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan pada 20 oktober 1961 di Jakarta. Pembentukan Sekber Golkar merupakan inisiatif dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), setelah adanya pengakuan tentang adanya kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional.

Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya Golkar mengikuti Pemilu dan langsung meraih suara pemilih terbanyak 62,79%. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, maka pada tanggal 17 juli 1971 Musyawarah Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Nama Golkar ini kemudian dikukuhkan secara resmi pada Munas Golkar, 4-5 september 1973, di kota Surabaya, Jawa Timur.

Semenjak itu, Golkar selalu tampil sebagai pemenang pemilu dan menjadi partai penguasa (*the ruling party*). Pada pemilu 1977 Golkar meraih 62,1%, pemilu 1982 meraih 63,9 %, pemilu 1987 meraih 73,1%, dan pemilu 1992 meraih 68,1%. Prestasi suara paling tinggi diperoleh pada pemilu 1997, dengan meraih 74,5%.²

Berdasarkan perolehan suara partai Golkar pada pemilu-pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup (*PR Closed List*), Golkar hanya satu kali tidak memperoleh suara terbanyak yaitu pada pemilu 1999, dikarenakan jatuhnya Presiden Soeharto-yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar-dari tampuk kekuasaan serta terjadinya perubahan politik ditingkat Nasional, serta banyaknya tekanan-tekanan dari masyarakat atas pembubaran Golkar.

² Partai – partai politik Indonesia; ideologi dan program 2004-2009. Buku Kompas. Jakarta. 2004

Pemilu 2004 yang berdasarkan UU No 12/ 2003 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, dimana Golkar kembali memperoleh suara terbanyak dengan memperoleh suara 24.480.757 atau 21,58% dengan perolehan 128 kursi. meskipun itu sistem proporsional yang namanya terbuka, namun tetap berjalan sebagai sistem yang tertutup (sedikit terbuka).

Pada pemilu 2009 ini perolehan suara menurut data dari KPU pusat, Golkar mengalami penurunan perolehan suara yang sangat signifikan.

Tabel 1.1

Perolehan Suara Golkar Tingkat Nasional

Pada pemilu 1999, 2004, 2009

Hasil	1999	2004	2009
Perolehan Suara	23.741.749	24.480.757	15.037.757
Persen	22,46	21,58	14,45
Jumlah Kursi	120	128	108

Pada pemilu 1999 dan 2004 di DIY, terdapat perubahan persentase perolehan suara Golkar, meskipun Golkar tetap berada di urutan ketiga namun terjadi penurunan perolehan suara, yaitu pada pemilu 1999 perolehan suara Golkar 14,34% menjadi 13,87% pada pemilu 2004 (menurun sebanyak 0,47% suara). Dari satu kota dan empat kabupaten di DIY Golkar mengalami penurunan perolehan suara, hanya di kabupaten Gunung Kidul perolehan suara Golkar meningkat yaitu dari 79.797 suara menjadi 99.563 suara. Sedangkan pada pemilu 2009 Golkar di DIY mengalami kenaikan perolehan suara berbeda dengan perolehan suara secara nasional yang mengalami penurunan.

Tabel 1.2

Perolehan Suara Golkar di Provinsi DIY pada pemilu

1999,2004,2009

Pemilu	Nama Partai Politik	Yk	Bantul	Sleman	GK	KP	JUMLAH
1999	GOLKAR	27.438	52.85	61.762	79.797	36.898	258.745
2004	GOLKAR	23.804	37.098	50.610	99.563	34.091	245.166
2009	GOLKAR	15.800	41.126	49.784	49.255	24.743	180.708

Berulang kali terjadi perubahan perolehan suara partai Golkar di tiap pemilu membuat peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh perubahan sistem pemilu terhadap perolehan suara partai Golkar, khususnya partai Golkar di DIY, dari beberapa kali perubahan sistem pemilu yaitu pemilu 1999 yang memakai sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup (*PR Closed List*) dan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (sedikit terbuka) pada pemilu 2004 dimana terjadi penurunan perolehan suara Golkar di DIY, dan dalam pemilu 2009 ini yang menggunakan sistem pemilu proporsional *open list* sistem suara terbanyak, Golkar kembali mengalami perubahan perolehan suara, apakah perubahan sistem pemilu memengaruhi perolehan suara Golkar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah Pengaruh Perubahan Sistem Pemilu Terhadap Perolehan Suara Golkar di DIY pada Pemilu 2009?

Perlu peneliti tegaskan bahwa sistem pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem pemilu yang dipakai di Indonesia pada pemilu 2009 yaitu representasi proporsional daftar terbuka suara terbanyak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: “untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem pemilu terhadap perolehan suara Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2009”.

Manfaat penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sistem pemilu, khususnya berkaitan dengan pengaruh perubahan sistem pemilu terhadap perolehan suara Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu 2009.

2. Secara praktis

Dapat memberikan masukan pada Golkar, untuk mengevaluasi dan memahami sistem pemilu yang dipakai terhadap perolehan suara, kemudian dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi penarikan massa, untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu-pemilu seterusnya.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pemilu dan Sistem Pemilu

Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa.

Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya.

Berdasarkan tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (*deliberation*). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.

Ilmu politik mengenal dua macam pemahaman tentang demokrasi. Pertama, pemahaman demokrasi secara normatif. Kedua, pemahaman demokrasi secara empirik. Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan suatu kondisi yang secara ideal ingin diselenggarakan oleh suatu

negara. Sedangkan dalam pemahaman empirik, demokrasi dikaitkan dengan kenyataan penerapan demokrasi dalam tataran kehidupan politik praktis³.

Untuk melihat apakah demokrasi diterapkan dengan baik dalam kehidupan politik secara empirik, para ahli politik membuat berbagai indikator untuk mengukurnya. Antara lain *Robert Dahl* mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dalam segi politik, secara bersama-sama berdaulat, memiliki kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan untuk memrintah diri mereka sendiri. indikator demokrasi yang diajukan Dahl adalah sebagi berikut:⁴

1. Adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
2. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, dan bebas.
3. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum.
4. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum.
5. Setiap warga negara memiliki hak politik, seperti kebebasan berekspresi, dan mengeluarkan pendapat, termasuk didalamnya mengkritik pemerintah.

³ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustak Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 3-4

⁴ Robert Dahl, *Demokrasi dan Para pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal.1

6. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain.
7. Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga otonom, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan mengikuti pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.

Dalam perspektif politik sekurang- kurangnya ada tiga fungsi pemilu, yakni fungsi keterwakilan, fungsi integrasi, dan fungsi mayoritas. Fungsi keterwakilan merupakan urgensi dinegara demokrasi baru dalam pemilu. Fungsi integrasi menjadi kebutuhan negara yang mengonsolidasikan demokrasi. Dan fungsi mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan pemerintahan (*governability*).⁵

Adapun pelaksanaan pemilu 2009 berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu:

Ayat 1 : *Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila*

⁵Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu, dari sistem sampai elemen teknis*. Semarang. Pustaka Pelajar. Hal 18

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Ayat 2 : Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Agar pemilu dapat berjalan sukses maka diperlukan sebuah sistem pemilu. Tidak diragukan lagi bahwa sistem pemilihan umum memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai seberapa penting sistem pemilihan umum dalam membangun struktur sebuah sistem politik. *Giovanni Sartori* menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum adalah "sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi". Tekanan juga diberikan oleh *Arend Lijphart* yang mengatakan "sistem pemilihan umum adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan".

Menurut *Benjuino Theodore*, istilah sistem pemilu memiliki definisi yang sempit dan ketat. Yaitu: 'Sistem pemilihan umum adalah rangkaian

aturan dimana pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara para pemilih diterjemahkan menjadi kursi”⁶

Definisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilihan umum. Adapun elemen dari sistem pemilihan umum adalah⁷:

1. Besaran Distrik

Yang dimaksud dengan distrik adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan pemilihan umum. Dengan demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besar wilayah administrasi pemerintahan, dapat pula berbeda. Definisi besar distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik bukan berarti berapa jumlah pemilih yang ada dalam distrik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut maka kita dapat membedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal (*single member district*) dan distrik beranggota jamak (*multi member district*).

⁶Theodore Benjuino, *Sistem Pemilihan Umum: Sebuah Perkenalan*. www. Pemilu Indonesia Online.com.9 maret 2009

⁷ Ibid.

TABEL 1.3

DISTRIK BERANGGOTA JAMAK

Jumlah Kursi yang Diperebutkan	Sub Kategori
2-5	Distrik Kecil
6-10	Distrik sedang
>10	Distrik Besar

2. Struktur Kertas Suara

Struktur kertas suara adalah cara penyajian pilihan di atas kertas suara. Cara penyajian pilihan ini menentukan bagaimana pemilih kemudian memberikan suara. Jenis pilihan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kategorikal dimana pemilih hanya memilih satu partai atau calon, dan ordinal dimana pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya. Kemungkinan lain adalah gabungan dari keduanya. Tabel di bawah menunjukkan contoh pembagian sistem pemilu berdasarkan struktur kertas suara.

TABEL 1.4
PEMBAGIAN SISTEM PEMILU BERDASARKAN STRUKTUR
KERTAS SUARA⁸

	Kandidat	Partai	keduanya
Kateg orikal	FPTP(kanada),SNTV (Jordania),Proporsiona l Daftar Terbuka (Finlandia)	Party Block (Singapore),Pro porsional Daftar Tertutup (Namibia)	Parallel Vote (Jepang),Proporsional Daftar Terbuka (Denmark),MMP (Jerman)
Ordin al	AV (Australia),SDP (Perancis),Block Vote (Maladewa),STV (Irlandia)	SDP (Mali)	SDP (Ukraina),Proporsiona l Daftar Bebas (Swiss)
Kedua nya			STV (Senat Australia)

3. Electoral Formula

Electoral Formula adalah bagian dari sistem pemilihan umum yang membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Termasuk di dalamnya adalah rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi, serta batas ambang pemilihan (*electoral threshold*).

Tabel di bawah memberikan gambaran ringkas mengenai beberapa jenis sistem pemilihan umum.

⁸ *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*, (Stockholm, Swedia, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1997)

TABEL 1.5

JENIS – JENIS SISTEM PEMILU⁹

Sistem	Ukuran Distrik	Tipe	Deskripsi
FirstPast the Post (FPTP)	tunggal	pluralitas	kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang terpilih, walaupun tidak mencapai mayoritas sederhana.
<u>Sistem Dua Putaran (SDP)</u>	tunggal	mayoritas	Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas sederhana, diadakan pemilihan pemilihan lanjutan diantara dua kandidat dengan suara terbanyak. Pemenang pemilihan lanjutan yang akan terpilih.
Alternative Vote (AV)	tunggal	mayoritas	Pemilih menentukan pilihan sesuai urutan preferensi. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas berdasarkan preferensi pertama, maka calon dengan preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai pilihan keduanya. Proses diulangi sampai ada calon dengan suara mayoritas.
Block Vote (BV)	jamak	pluralitas	Pemilih memberikan pilihan sebanyak jumlah kursi tersedia. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.

⁹ Theodore Benjuino, *Sistem Pemilihan Umum: Sebuah Perkenalan*. www. Pemilu Indonesia Online.com

Sistem Dua Putaran, Two-Round System	jamak	semi proporsional	Pemilih memberikan satu pilihan. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.
<u>Single Transferable Vote (STV)</u>	jamak	proporsional	Pemilih menentukan pilihan sesuai urutan preferensi. Kandidat dengan pilihan pertama mencapai quota akan terpilih. Calon dengan preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai pilihan keduanya. Proses diulangi sampai diperoleh n calon yang mencapai quota.
<u>Parallel Vote</u>	campuran	semi proporsional	Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal ditambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak. Kursi proporsional diberikan terlepas dari hasil yang dihasilkan dari pemilihan lewat distrik beranggota tunggal.
<u>Mixed Member Proportional (MMP)</u>	campuran	proporsional	Legislatur terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal ditambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak. Kursi proporsional diberikan untuk mengkompensasi efek disproportional yang timbul dari hasil distrik beranggota tunggal.

Representasi Proporsional Daftar	jamak	proporsional	Pemilih memilih dari daftar yang disediakan, kursi diberikan sesuai proporsi suara yang diterima oleh partai. Kandidat terpilih berdasarkan urutannya dalam daftar.
----------------------------------	-------	--------------	---

Namun dalam memilih sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum disemua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan.

Terkait hal itu, *Joko J. Prihatmoko* menjabarkan ada sekurangnya enam prinsip yang menjadi petunjuk dalam memilih sistem pemilu, yaitu:¹⁰

1. Sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap watak atau karakter persaingan kontestan.
2. Sistem pemilu dapat dengan mudah dimanipulasi, khususnya oleh partai- partai besar, untuk memperlancar perilaku politik tertentu.
3. Sistem pemilu dapat mempengaruhi jumlah dan ukuran relatif partai politik di parlemen.
4. Sistem pemilu juga menentukan keterpaduan internal dan disiplin masing- masing partai.

¹⁰ Prihatmoko, Joko J. (2008). *Mendemokratiskan Pemilu, dari sistem sampai elemen teknis*. Semarang. Pustaka Pelajar. Hal. 33-34

5. Sistem pemilu bisa mengarahkan pada pembentukan koalisi atau pemerintahan satu partai dengan kendala yang dihadapi partai mayoritas.
6. Sistem pemilu dapat mendorong atau menghambat pembentukan aliansi diantara partai-partai; dan bisa pula memberikan rangsangan kepada beberapa kelompok agar lebih bersikap akomodatif atau memberikan dorongan kepada partai-partai untuk menghindari konflik berdasarkan ikatan etnik, kesukuan atau kekerabatan.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008, sistem pemilu untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu sistem Representasi proporsional daftar terbuka. Sedangkan DPD menggunakan sistem *Block Vote*, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5:

Ayat 1 : Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Ayat 2 : Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Representasi proporsional daftar meliputi kegiatan berikut: setiap partai politik menyajikan daftar nama caleg kepada pemilih, kemudian pemilih memilih suatu partai, dan partai memperoleh suara sebanding dengan perolehan suaranya secara nasional. Para caleg diambil secara berurutan dari daftar tersebut.¹¹

¹¹ Reynolds. Andrew. *Sistem Pemilu*. www.Aceproject.org. Hal 100-101

Sistem representasi proporsional daftar yang murni yaitu sistem representasi proporsional daftar tertutup, artinya bahwa urutan caleg yang dipilih berdasarkan daftar tersebut ditentukan oleh partai sendiri, dan pemilih tidak dapat mengungkapkan suatu preferensi terhadap caleg mana yang disukainya. Melihat sisi negatif dari sistem daftar tertutup, maka kemudian diperkenalkan sistem daftar terbuka, di mana seorang pemilih punya pilihan, memberikan suaranya kepada partai atau kepada kandidat.¹²

Di dalam sistem representasi proporsional daftar terbuka, pemilih dapat memilih bukan saja partai yang mereka sukai, tetapi juga caleg dari partai tersebut yang mereka sukai. Dalam kebanyakan sistem, pemberian suara pada partai dan sekaligus caleg tidak mutlak sifatnya, tetapi karena kebanyakan pemilih langsung memilih partai ketimbang caleg. Opsi untuk memilih caleg dikertas suara seringkali mempunyai efek yang sedikit saja. Tetapi dalam banyak hal pilihan ini begitu pentingnya, karena pemilih harus memilih caleg, dan urutan caleg akan mendapatkan kursi tergantung pada jumlah suara yang mereka peroleh masing – masing.¹³

Electoral Formula yang digunakan didalam sistem representasi proporsional daftar yaitu:¹⁴

1. Largest Remainder (sisa suara terbanyak), menggunakan kuota:

- Hare :votes:seats
- Droop : (votes:seats+1)+1
- Imperialli : votes:seats+2

¹² Ibid. Hal. 111

¹³ Ibid. Hal 111

¹⁴ Ibid. Hal 72

2. Highest Average (rata-rata tertinggi), ada dua tipe utama divisor:

- D'Hondt system (bilangan pembagiannya adalah: 1,2,3,4 dst)
- Saint Lague yang diperbaharui (bilangan pembagiannya adalah: 1.4, 3, 5, 7, dst).

Menurut *Ben Reilly dan Andrew Reynolds*, *Block Vote* (BV) sebenarnya adalah penggunaan FPTP dalam distrik wakil majemuk. Dimana para pemilih diberi kesempatan untuk memilih sebanyak kursi yang akan diisi, dan biasanya mereka bebas memilih caleg tanpa mempertimbangkan afiliasi partainya. Dalam sistem BV, para pemilih dapat menggunakan sebanyak mungkin atau sedikit mungkin, pilihan yang mereka mau.

Keuntungan dari *Block Vote* menurut *Andrew Reynolds* adalah:

- a. Mudah penggunaannya
- b. Mendorong tumbuhnya partai-partai yang kuat
- c. Memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk memasang campuran caleg sehingga minoritas dapat terwakili.

Dampak negatif dari *Block Vote* juga menurut *Andrew Reynolds* yaitu: Pertama, pada saat pemilih memberikan suaranya untuk caleg-caleg dari sebuah partai, yang pada umumnya terjadi sistem tersebut cenderung memperburuk kekurangan kekurangan sistem FPTP, terutama segi disproportionalitasnya. Kedua, Kekurangan yang paling kritis dari BV adalah munculnya hasil super mayoritas. Yaitu dimana sebuah partai dapat memenangkan semua kursi dengan suara mayoritas sederhana.

Berikut perubahan-perubahan sistem pemilu yang terjadi di Indonesia dari Orde baru hingga pemilu 2009, yaitu:

- a. Pada masa Orde baru hingga Pemilu 1999 Indonesia menggunakan Sistem Pemilu representasi proporsional daftar tertutup
- b. Pada pemilu 2004 Indonesia menggunakan Sistem Pemilu representasi proporsional daftar terbuka, dengan penetapan calon terpilih masih dibatasi dengan perolehan suara sebesar BPP (Bilangan Pembagi Pemilih).
- c. Pada pemilu 2009 Indonesia menggunakan Sistem Pemilu representasi proporsional daftar terbuka dengan penetapan calon suara terbanyak.

2. Pengertian Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Partai politik telah menempati wilayah yang luas dalam kehidupan politik modern sehingga saat ini sangat banyak literatur ilmiah baik berdasarkan subjeknya maupun relasi partai dengan institusi pemerintahan dan kebiasaan politiknya secara umum. Kemungkinan pentingnya keberadaan partai politik adalah dengan mempertimbangkan kembali batas-batas yang diidentifikasi oleh pengalaman dan kajian.

Menempatkan definisi partai politik itu tidak semudah yang dikira. Bagaimana seseorang mendefinisikan “partai” dengan menentukan subjek dan studi metode. Secara harfiah jelas bahwa partai politik adalah sebuah kelompok yang di dalamnya terkait luas dengan seluruh komunitas yang bersifat politis. Namun tidak semua komunitas politik dapat disebut partai politik. Mungkin saja mereka cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap

pembuat kebijakan dalam pemerintahan, mungkin saja mereka mengeluarkan banyak uang dan melakukan langkah politik dalam proses kampanye dalam pemilu untuk kepentingan dukungan bagi para kandidat untuk menempati jabatan publik. Namun mereka tidak dinisbatkan sebagai partai politik selama mereka tidak memberikan label politik.

Menurut *Carl J. Fredrich*: “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat isi maupun materi” (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for us leader the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material and advantage*).¹⁵

R.H. Soltau: “partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”. (*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*).¹⁶

Sigmund Neumann: “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan

¹⁵ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal.161

¹⁶ Ibid. Hal. 161

serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda” (*A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*)¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi mengenai partai politik diatas, maka secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.¹⁸

Undang-undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, disebutkan dalam pasal 1 yaitu:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

¹⁷ Ibid. hal 162

¹⁸ Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.87

Miriam Budiarjo menyebutkan empat fungsi utama yang dijalankan oleh partai politik, yaitu:¹⁹

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Sebagai salah satu tugas dari partai politik yaitu menyalurkan segala aspirasi yang berkembang dimasyarakat supaya tidak terjadi kesimpangsiuran. Segala masukan dan aspirasi ini kemudian ditampung untuk kemudian diteruskan menjadi sebuah sarana kebijakan melalui wakil-wakil partai tersebut yang duduk dilembaga legislatif maupun eksekutif. Partai juga berusaha untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap masyarakat luas terutama konstituennya (dalam hal ini partai sering disebut sebagai broker). Dengan fungsi tersebut maka partai politik melakukan komunikasi politik melalui dua arah yaitu dari atas melalui penyebarluasan kebijakan-kebijakan pemerintah, juga dari bawah dengan cara menyampaikan saran dan tuntutan dari masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga tinggi negara.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Kedudukan partai sebagai organisasi yang melaksanakan sosialisasi politik berarti partai dalam setiap kegiatannya baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan suatu perspektif, sikap dan orientasi kepada masyarakat dalam melihat fenomena politik. Proses ini berlangsung secara terus menerus dari masa kanak-kanak sampai orang

¹⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 163-164

ini dewasa. Fungsi ini dilakukan melalui kampanye-kampanye dan diskusi-diskusi politik suatu partai dalam usahanya memenangkan pemilu. Melalui ini partai menanamkan image yang positif kepada calon pendukungnya, sekaligus memberikan pandangan dan sikap kepada mereka dalam menilai isu-isu politik.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Ini dimaksudkan bahwa partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Caranya yaitu dengan persuasi, kontak pribadi, *open recruitment*, dan lain sebagainya. Dengan demikian partai telah turut serta memperluas partisipasi politik dan mengikis diskriminasi politik. Melalui sarana rekrutmen politik juga partai bertanggung jawab dalam menjamin sirkulasi kepemimpinan politik di suatu negara, karena diharapkan dalam jangka panjang partai melakukan *follow up* dengan melakukan kaderisasi anggota-anggotanya supaya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan politik dimasa mendatang.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur politik

Dalam suasana demokrasi dimana perbedaan pendapat dimasyarakat rentan memunculkan konflik maka partai politik melakukan fungsinya dengan mengatur konflik tersebut supaya tidak menimbulkan akses negatif. Partai dituntut untuk menyelesaikan konflik yang sedang

terjadi. Namun dalam perkembangannya justru partai politiklah yang kerap membuat konflik itu sendiri demi kepentingan pragmatis.

Kehadiran partai politik dalam sebuah negara demokrasi berfungsi melakukan: Pertama, sosialisasi politik-proses pembentukan sikap dan orientasi politik-anggota masyarakat. Lewat proses ini diupayakan agar anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Kedua, komunikasi politik-proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Ketiga, rekrutmen politik- seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Keempat, pengelola konflik-mengendalikan konflik lewat cara berdialog dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik dan membawanya keparlemen untuk mendapatkan penyelesaian lewat keputusan politik. Kelima, artikulasi dan agregasi kepentingan- menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Keenam, jembatan antara rakyat dan pemerintah- sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah terhadap tuntutan rakyat.²⁰

²⁰ Adman Nursal. 2004. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, hal. 141

Dengan sejumlah fungsi yang melekat dalam dirinya, kehadiran dan peran partai politik amat penting dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Karena partai politik menjadi salah satu sarana untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai.²¹Di samping itu, partai politik juga dapat memperjuangkan kepentingan warga (konstituennya) serta memberikan penjelasan kepada mereka mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah. Jika fungsi-fungsi tersebut bekerja dengan baik maka demokrasi akan berjalan dengan sehat, bila sebaliknya maka kehidupan demokrasi akan mengalami *instabilitas*.

Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam masyarakat yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman di beberapa dunia ketiga menunjukkan pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat kalau sistem kapartaianya sendiri tidak ikut diperbaharui.

Biasanya kajian teoritis tentang sistem kepartaian mengacu pada dua aspek. Pertama, kajian yang menyoroti sistem kepartaian berdasarkan aspek tipologi numerik (*numerical typology*), yaitu sejumlah partai yang dianutnya. Kedua, kajian yang menyoroti sistem kepartaian berdasarkan

²¹ Ichlasul Amal (ed.).1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hal. xi.

basis pembentukan dan orientasi ideologisnya, yaitu antara partai inklusif dan eksklusif. Berbagai kajian mengenai sejumlah sistem kepartaian didunia berdasarkan tipologi numerik menunjukkan setiap sistem yang ada yaitu; partai tunggal, dwipartai, dan multi partai.

Sistem satu partai/tunggal (*single party system*) digunakan untuk partai yang hanya ada satu-satunya dalam sebuah negara ataupun satu partai yang sangat dominant kedudukannya diantara partai-partai lain. Sistem dua partai/dwipartai (*two party system*) digunakan untuk menyebutkan sistem kepartaian disuatu negara, dimana hanya ada dua partai atau dua partai dominant yang berkedudukan sebagai partai berkuasa dan partai oposisi diantara partai-partai lain. Sistem multi partai (*multy party system*) dimana terdapat banyak partai politik yang kedudukannya hampir berimbang atau tidak ada partai yang kedudukannya mendominasi partai-partai lain. Apabilah dikaitkan dengan sistem pemilu, pada negara yang memiliki sistem dua partai biasanya dikaitkan dengan pemilu sistem distrik, sedangkan pada negara yang memiliki sistem multi partai biasanya dikaitkan dengan pemilu sistem perwakilan berimbang/proporsional.

Menurut *Harry Eckstein* ciri-ciri syarat bagi berfungsinya suatu sistem kepartaian itu adalah adanya pola interaksi yang kompetitif antar partai maupun adanya peranan yang potensial atau aktual dari partai-partai yang terdapat dalam sistem tersebut. Kalau argumen diatas dikaitkan dengan kebutuhan akan suatu sistem politik yang stabil, maka pola interaksi yang kompetitif itu mengisyaratkan juga adanya kesepakatan mendasar bahwa

kompetisi hanya menyangkut pada isu-isu publik yang ditawarkan dan bukan pada ideologi yang menjurus pada konflik.

Jadi bila satu partai menjadi pemenang dalam suatu pemilihan umum dan memegang kendali pemerintahan, partai-partai yang kalah akan bertindak sebagai pengkritik kebijakan pemerintahan sambil menawarkan alternatif kebijakannya guna menarik dukungan pemilih pada pemilu berikutnya. Kendati begitu, mereka tetap mengakui keabsahan pemerintah yang sedang berkuasa, atau menjadi apa yang disebut “oposisi yang setia” (*loyal opposition*).

Dari segi jumlah, sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sistem kepartaian. Pada masa demokrasi parlementer (1945-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1965), yang dianut adalah sistem multi partai. Sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer mampu meluaskan derajat partisipasi politik dan mampu pula melembagakan saluran-saluran bagi perluasan partisipasi tersebut, namun tidak memiliki landasan yang kokoh, sehingga pola interaksinya bukan hanya kompetisi melainkan konflik-konflik ideologis. Akibatnya, seiring dengan meningkatnya derajat partisipasi politik, muncul rangkaian konflik dan polarisasi dengan derajat yang tinggi pula, dan pada gilirannya ikut menggoyahkan sistem partai yang berlaku saat itu. Sistem kepartaian pada masa demokrasi terpimpin juga mampu menjaga derajat partisipasi politik yang tinggi, namun pelembagaannya menjadi terbatas dengan dibubarkannya PSI dan Masyumi. Dan dengan beralihnya pusat

percaturan politik dari parlemen ke tangan Presiden Soekarno, maka sesungguhnya awal dari proses mudarnya peranan partai-partai politik tak terhindari lagi. Proses kemerosotan peranan partai-partai politik pada masa demokrasi terpimpin itu terus berlanjut hingga sekarang.

Sementara pada masa orde baru dimana jumlah partai sudah dicitkan hanya tiga (PPP, PDI, dan Golkar) dengan dipotongnya hubungan partai dengan basis pendukungnya, berupa meminimalisasikan peran PPP dan PDI dan memaksimalkan kekuatan dan peran Golkar, sebagai partai pemerintah. Kemenangan mutlak yang diperoleh Golkar sejak pemilu 1971 hingga pemilu 1997 telah menjadikan Golkar memenuhi kriteria sebagai *Dominant Party*, dan karenanya sistem kepartaian saat itu digolongkan sebagai sistem dominan satu partai (*one party dominance*).

Pasca reformasi 1998 hingga saat ini sistem kepartaian yang dipakai oleh Indonesia adalah sistem multi partai. Dengan menggunakan sistem multi partai ini serta dijaminnya pembentukan partai politik oleh konstitusi sebagai konsekuensi dari hak kebebasan politik untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Akibatnya banyak berdirinya partai politik baru, dan animo pendirian partai politik yang besar ini menunjukkan iklim demokrasi sudah berjalan kembali setelah 30 tahun pengekan partisipasi politik oleh Orde baru.

Samuel Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukan jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung.

Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial yang baru muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai akan menjadi penting bila dapat mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh menurut Huntington sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomic dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru kedalam sistem politik.

3. Teori Pengaruh Sistem Pemilu Terhadap perolehan suara partai politik

Dalam membahas teori pengaruh sistem pemilu terhadap perolehan suara suatu partai politik, penulis mengambil salah satu teori yaitu, perilaku pemilih. Ada beberapa teori mengenai faktor penyebab seseorang memilih yaitu:

- a) *Party Identification* adalah keterikatan dalam jangka waktu lama antara seseorang dengan partai tertentu yang akan menentukan interpretasi

politiknya. *Party identification* ini seringkali diwarisi dari keluarganya dan kemudian diperkuat melalui lingkungan pergaulan sosialnya. *Party identification* ini akan mempengaruhi pilihan seseorang dalam sebuah pemilu.

- b) *Retrospective Voting* adalah pemberian suara seseorang adalah respon orang tersebut terhadap kinerja pemerintahan. Ada empat faktor yg dianggap berpengaruh, yaitu isu-2 politik, permasalahan ekonomi, para pemimpin partai, dan citra partai. teori “*Retrospective Voting*” ini digagas oleh *Fiorina*.

Perilaku pemilih memang ada yang dipengaruhi faktor sosiologi seperti kesamaan etnis dan budaya. Pendukung teori ini, di antaranya *Scott C. Flanagan, David Denver, Gerald Pomper, dan Seymour Martin Lipset*. Mereka melihat kecenderungan faktor etnis (dan juga aliran) ini pada beberapa kasus pemilu di Inggris dan Jepang.

Angus Campbell dari Universitas Michigan berseberangan dengan pandangan sosiologis. Berdasar pada hasil risetnya di Amerika, Angus melihat faktor psikologis seperti pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pemilih kepada kandidat, yang dominan memengaruhi pemilih.

Richard Niemi dan Herbert F. Weisbergg menjelaskan berdasar pada risetnya di beberapa negara bagian Amerika, terdapat perilaku pemilih yang rasional (*rational-choice*) yang cenderung pragmatis dan ekonomis. Bila kandidat dipandang menguntungkan, mulai pencoblosan hingga berkuasa kelak, pemilih akan memilihnya. Sebaliknya, bila hanya merugikan waktu

kerja, tenaga, dan menghabiskan biaya, pemilih tidak akan mencoblos (golput).

Ian Mc Allister berpendapat ada perilaku pemilih Australia yang konsen pada faktor struktural (memilih berdasarkan kedekatan kelas sosial-ekonomi, desa-kota, dll) dan faktor ekologi (memilih berdasar pada kedekatan karakteristik wilayah pedalaman, pesisir, pertanian, perkebunan, dll).

Jadi, dalam perspektif yang lebih kompleks setidaknya ada lima faktor memengaruhi perilaku pemilih, yakni faktor sosiologi (etnis, aliran), psikologi, rasional-pragmatis, struktural, dan ekologi. Faktor-faktor ini bersifat komplementatif, relatif, dan tentu saja tidak absolut.

Berikut beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih:²²

1. Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya, memberi pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

²² Adman Nursal, 2004 *Political Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 54

2. Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Pendekatan ini menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap ini terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon pemilih masih berusia dini. Dimana seorang calon pemilih telah menerima “pengaruh” politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi langsung maupun dari pandangan politik yang diekspresikan oleh orang tuanya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau ikatan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan inilah yang kemudian disebut sebagai identifikasi partai, sebuah variabel inti untuk menjelaskan pemilih berdasarkan Mazhab Michigan.

3. Pendekatan Rasional

Perilaku pemilih dapat berubah kapan saja, dalam artian bahwa perilaku pemilih tidak hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasi partai saja. Oleh karena itu pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu, dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari partai yang berkuasa kelak dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara orientasi kandidat bagaimana kemampuan kandidat untuk mengelola dan

mewujudkan isu dalam agenda pemerintah bila kelak terpilih. Oleh karena itu, “pesona” kandidat juga menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku pemilih.

4. Pendekatan Domain Kognitif (Pendekatan Marketing)

Newman & Sheth mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Dalam mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut kemulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksikan perilaku pemilih.

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- a. Isu dan kebijakan politik (*issue and policies*), merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
- b. Citra sosial (*social imagery*), menunjukkan stereotif kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
- c. Perasaan emosional (*emotional feeling*), dimensi emosional yang terpancar dari kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh policy politik yang ditawarkan.

- d. Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
- e. Peristiwa mutakhir (*current events*), mengacu pada himpunan isu, peristiwa, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
- f. Peristiwa pribadi (*personal events*), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.
- g. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*), isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.

Berhubungan dengan sistem pemilu 2009 yang menggunakan sistem representasi proporsional daftar terbuka, maka dari beberapa pendekatan perilaku pemilih diatas yang mempengaruhi perolehan suara partai politik yaitu :

1. sosial *imagery* atau citra sosial (pengelompokan sosial)
2. kandidat (*emotional feeling and candidate personality*)
3. isu dan kebijakan politik (*issue and policies*)
4. peristiwa-peristiwa tertentu (*current events and personal events*)
5. faktor-faktor epistemic (*epistemic issue*)

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembahasan berisi definisi dari konsep atau variable yang merupakan simpulan

deduktif dari teori-teori yang digunakan dalam kerangka dasar teori. Adapun definisi konseptual dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **Pemilu (Pemilihan Umum):** sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. **Sistem Pemilu:** seperangkat metode untuk menstransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen.
3. **Golkar:** Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau disingkat Sekber Golkar. Sekber Golkar merupakan perhimpunan (federasi) 97 organisasi fungsional non afiliasi politik yang anggotanya terus berkembang hingga menapai 220 organisasi.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah berisi operasionalisasi variabel sampai indikator yang merupakan salah satu unsur sebagai petunjuk pelaksanaan mengukur variable. Definisi Operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Elemen-elemen Sistem pemilu, yang mencakup:

1. Besaran distrik (District Magnitude)
2. Struktur kertas suara (Ballot Structur)
3. Formula Penghitungan (Electoral Formula)
 - 3.1. Representasi Proporsional Daftar Terbuka Suara terbanyak.
 - 3.2. Metode Penghitungan Suara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis suatu kasus dalam hal ini study kasusnya adalah pengaruh perubahan sistem pemilu terhadap perolehan suara partai Golkar di DIY pada pemilu 2009.

Metode deskriptif ini bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pada hakekatnya metode deskriptif mengumpulkan data secara univariat.²³ Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah prosedur penelitian yang berdasarkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.²⁴

Pemahaman serupa juga diungkapkan oleh *Hadari Nawawi*²⁵ yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

2. Unit Analisis

Pada penelitian ini, informan ditentukan secara *purposive sampling* yaitu sampel yang ditunjukkan langsung kepada objek penelitian dan tidak diambil secara acak, tetapi sample bertujuan untuk memperoleh nara sumber yang mampu memberikan data secara baik. Dengan tujuan untuk menggali informasi yang akan

²³ Jalaludin Rahmat, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. PT Remaja Rosdakrya. Hal. 24

²⁴ Lexy Moloeng, 1999. *Metode pnelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3

²⁵ Nawawi Hadari, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 63

menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul.²⁶ Ditegaskan pula bahwa *purposive sampling* adalah sampling yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.²⁷ Dalam hal ini unit analisis penelitian adalah DPD Golkar Propinsi DIY, dan para pengurus maupun kader partai Golkar di DIY yaitu wakil ketua DPD Golkar Propinsi DIY Bapak Drs. John Serang Keban dan KPUD Propinsi DIY yaitu Bapak Muhammad Najib, yang menjadi sumber data.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu berupa data hasil wawancara atau interview dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau sumber informasi. Data atau informasi itu berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran, atau pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu hal yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian.

Menurut *Nasution* Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan tujuan tertentu. Atau dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.²⁸ Wawancara dilakukan dengan maksud mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimanapun pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui *observasi*²⁹ seperti ditegaskan *Lincoln dan Guba*, wawancara dimaksudkan antara lain untuk

²⁶ Lexy Moloeng, 1999. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 164

²⁷ Nasution. *Metode Research*. Jakarta. Bumi Aksara. 2001 hal. 98

²⁸ Ibid. hal.115

²⁹ Ibid hal. 114

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.³⁰

*Hadari Nawawi dan Martini Hadari*³¹ menyebutkan fungsi wawancara sebagai teknik pengumpul data, yaitu :

- a. Sebagai alat pengumpul data primer.
- b. Sebagai alat pengumpul data pelengkap.
- c. Sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama.

Selain itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian, kemudian melakukan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis tersebut baik dari jurnal, buku, koran, majalah ilmiah, dan lain-lain. Atau cara mengumpulkan data tertulis berupa arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³² Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari sumber para pengurus maupun kader partai Golkar di DIY yaitu wakil ketua DPD Golkar Propinsi DIY Bapak Drs. John Serang Keban dan anggota KPUD Provinsi DIY Bapak Muhammad Najib, serta DPD Golkar Provinsi DIY dan KPUD Propinsi DIY sebagai sumber data skunder.

³⁰ Lexy Moloeng, 1999. *Metode pnelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 135

³¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, Hal. 98-100

³² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.95.

4. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data hasil penelitian memakai metode analisa diskriptif kualitatif. Data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka per-angka. Pengorganisasi studi kasus merupakan salah satu strategi umum yang dipakai untuk mengembangkan suatu kerangka kerja diskriptif.³³

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa bentuk kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung.³⁴

Penelitian kualitatif biasanya meliputi ratusan bahkan ribuan halaman,³⁵ karenanya untuk menghindari keribetan dan tercecernya data-data yang telah didapat, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa prosedur analisa data dan dimasukkan untuk menghindari hal-hal yang akan menambah rumit penelitian ini, adapun prosedur tersebut meliputi:

a. Pengumpulan data

Segala hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti hasil wawancara, segala referensi dari observasi yang dilakukan selama penelitian, dikumpulkan dalam sebuah buku catatan penelitian.

b. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi pada data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

³³ Robert, Yin. 1996. *Studi Kasus*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 137

³⁴ Lexy Moloeng, 1999. *Metode pnelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 3

³⁵ Nasution. *Metode Research*. Jakarta. Bumi Aksara. 2001 hal. 128

c. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penyimpulan

Peneliti mencoba menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam bentuk laporan untuk kemudian memilih dan menghubungkan serta memilih data yang relevan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

5. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Menurut Lexy J.Moleong³⁶ ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur keabsahan data, yaitu: 1) perpanjangan keikutsertaan, 2) ketekunan pengamatan, 3) triangulasi, 4) pengecekan sejawat, 5) kecukupan referensi, 6) kajian kasus negatif, 7) pengecekan anggota.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan data dengan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu³⁷. Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

³⁶ Lexy Moloeng, 1999. *Metode pnelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 175

³⁷ Ibid. hal 178

Patton³⁸ berpendapat bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu, dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Sistematika Penulisan

Demi mendapatkan gambaran sistematis mengenai permasalahan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang akan menguraikan isi dari penelitian ini. Adapun uraian tersebut disajikan oleh peneliti dalam sistem bab per-bab, dimana bab-bab tersebut juga terdiri dari beberapa sub-sub bab. Penelitian ini terdiri dari 4 bab, yang meliputi:

- a. Bab satu, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori yang berisikan teori-

³⁸ Ibid. hal 178

teori yang berhubungan dengan penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- b. Bab dua, berisi tentang gambaran umum Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Provinsi DIY.
- c. Bab tiga, berisi tentang pembahasan tentang hasil penelitian dari data yang diperoleh dan dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
- d. Bab empat, merupakan kesimpulan semua pembahasan dari penelitian baik secara umum maupun khusus, kemudian disertakan saran dan harapan yang ditunjukkan sebagai rujukan dalam perbaikan ke arah yang lebih baik.